

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam menurunkan stunting di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022-2024 telah berjalan melalui kolaborasi lintas sektor antara Bappeda, TPPS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPPKBP3A, pemerintah nagari, Puskesmas, bidan desa, kader posyandu, sektor swasta melalui CSR perusahaan sawit, Tanoto Foundation, serta tokoh agama, adat, dan masyarakat. Proses kolaborasi ini dianalisis melalui lima indikator Ansell dan Gash (2008): face to face dialogue, trust building, shared understanding, commitment to process, dan intermediate outcomes. Kolaborasi ini menunjukkan penurunan prevalensi stunting yang lebih cepat, meskipun sejumlah aspek masih perlu diperkuat.

Dialog tatap muka berlangsung melalui forum Rembuk Stunting dan rapat evaluasi intervensi serentak yang difasilitasi Bappeda, serta forum Rumah Desa Sehat (RDS) dan FGD di tingkat nagari, sebagaimana dari penetapan 85 anak stunting di Kecamatan Kinali sebagai penerima dukungan dana CSR dari 12 perusahaan sawit. Namun, partisipasi belum sepenuhnya setara karena Bappeda dan Dinas Kesehatan masih dominan dalam menentukan agenda, sementara sektor swasta dan tokoh masyarakat cenderung reaktif terhadap undangan pemerintah. Kepercayaan antaraktor terbangun secara bertahap melalui transparansi data stunting pada sistem e-PPGBM dan pelaporan

penyaluran dana CSR dari Wilmar Group beserta perusahaan lainnya, yang menyalurkan lebih dari Rp304.950.000, pendampingan PKH oleh Dinas Sosial, serta koordinasi informal antaraktor. Meski demikian, masih terdapat ketimpangan kapasitas antara aktor besar dan aktor kecil seperti pemerintah nagari dan kader posyandu, sehingga partisipasi lebih mencerminkan kepatuhan birokratis daripada hubungan timbal balik yang setara.

Pemahaman bersama dibentuk melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi stunting nasional yang difokuskan pada empat penyebab utama stunting di daerah, yaitu rendahnya imunisasi dasar lengkap, minimnya ASI eksklusif, terbatasnya akses sanitasi dan air bersih, serta tingginya keluarga perokok. Kesepahaman ini melahirkan berbagai inovasi program lintas sektor, meski pemahaman mengenai batas peran tokoh masyarakat dan tokoh agama masih belum merata. Komitmen terhadap proses terlihat dari konsiten Puskesmas, bidan desa, dan kader posyandu dalam intervensi gizi, penimbangan, dan edukasi di tengah penolakan sebagian orang tua, dukungan teknis Tanoto Foundation sejak 2022, serta kontribusi CSR berkelanjutan melalui Brondol Sawit. Komitmen ini terbukti tidak bergantung pada satu pemimpin, ditandai keberlanjutan program meski terjadi pergantian kepemimpinan daerah akhir 2024. Namun, komitmen lintas OPD masih cenderung administratif dan belum diiringi alokasi anggaran intervensi langsung yang proporsional.

Proses tersebut menghasilkan intermediate outcomes berupa penurunan prevalensi stunting dari 35,5% (2022) menjadi 29,7% (2023) dan 26,6%

(2024), dengan laju penurunan rata-rata 4,45% per tahun jauh melampaui laju nasional (0,85%) maupun Provinsi Sumatera Barat (0,15%). Capaian ini didukung oleh inovasi Madu Pedas, SiKepiting, Ceting Rematri, dan Brondol Sawit, meskipun penurunan belum merata secara spasial karena Puskesmas Ujung Gading dan Aia Gadang justru mencatat kenaikan prevalensi. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa *collaborative governance* yang terstruktur mampu mempercepat penurunan stunting secara signifikan, walaupun angka stunting pada tahun 2024 mencapai 26,6% dan masih melampaui target nasional 14%, kolaborasi antaraktor perlu terus diperkuat agar penurunan stunting dapat berjalan lebih optima

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ke depannya.:

### 1. Secara Teoritis

Peneliti menyarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan analisis terkait dengan implementasi *collaborative governance* sebagai kerangka strategis dalam mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting, khususnya di tingkat daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih jauh dinamika hubungan antaraktor, terutama terkait proses koordinasi, komunikasi, serta pembagian peran dalam kolaborasi.

Selain itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana faktor kepercayaan, kepemimpinan, serta kepentingan masing-masing aktor mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam penanganan stunting.

## 2. Secara Praktis

1. Saran untuk pemerintah, baik OPD, sektor swasta, maupun lembaga nonpemerintah, untuk memperkuat kolaborasi yang telah terbangun dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
2. Penguatan peran perlu dioptimalkan sebagai wadah utama dalam mengintegrasikan program, memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, serta menghindari lempar tanggung jawab kebijakan di lapangan. Selain itu, diperlukan peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.

